



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)
JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Filosofi masa perbudakan di Palembang berkaitan dengan perilaku masyarakat

Farida Ratu Wargadalem
Universitas Sriwijaya, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Nov 23rd, 2022
Revised Apr 08th, 2023
Accepted Jul 15th, 2023

Keyword:

Masa perbudakan,
Kesultanan Palembang,
Perilaku masyarakat

ABSTRACT

Budak dan perbudakan merupakan suatu profesi, dan sistem yang telah berjalan sejak lama sekali ribuan tahun seiring perjalanan peradaban manusia. Tulisan yang membahas tentang bagaimana hubungan antara perbudakan di Kesultanan Palembang dan tekanan dari Inggris dan Belanda agar menghapuskan perbudakan di daerah tersebut. Metode yang digunakan adalah metode Sejarah yang terdiri dari pengumpulan data, melakukan kritik terhadap sumber/data yang diperoleh. Selanjutnya, melakukan interpretasi sumber dan rekonstruksi. Hasilnya adalah bahwa Palembang adalah salah satu pusat perdagangan budak khususnya di kawasan barat Nusantara. Perbudakan terjadi tidak hanya di ibukota kerajaan juga di daerah pedalaman. Inggris yang berhasil memenangkan peperangan dengan Kesultanan Palembang (1812) menekankan masalah penghapusan budak di dalam perjanjian yang dibuat antara Palembang dan Inggris. Hal yang sama terjadi ketika menjelang perang antara Belanda dan Palembang juga dibuat perjanjian antara Sultan Ahmad Najamuddin III (Prabu Anom) pada April 1821, isinya memuat permasalahan penghapusan perbudakan, tentang pengangkatannya sebagai Sultan Palembang, dan menjadi sultan jika bersedia membantu Belanda melawan Kesultanan Palembang di bawah Sultan Mahmud Badaruddin II. Perbudakan terjadi jika terjadi hierarki dalam masyarakat dan pemerintahan (ada yang berkuasa dan ada yang dikuasai). Perbudakan seringkali terjadi dalam masyarakat yang miskin dan terpinggirkan, dan dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi.



© 2023 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Corresponding Author:

Farida Ratu Wargadalem
Universitas Sriwijaya
Email: farida_wd@fkip.unsri.ac.id

Pendahuluan

Keberadaan budak merupakan sebuah realitas historis. Budak dan perbudakan merupakan suatu profesi, dan sistem yang telah berjalan sejak lama sekali ribuan tahun seiring perjalanan peradaban manusia. Keberadaan budak dan institusi perbudakan merupakan fenomena umum dan hampir dapat ditemui di berbagai komunitas masyarakat di dunia (Apriana & Heryati, 2021). Bahkan tak jarang budak telah menjadi komoditas penting dan menjanjikan di setiap zamannya serta tetap eksis dari waktu ke waktu walaupun telah terjadi peralihan zaman. Perbudakan adalah wajah dunia yang menempatkan manusia (seseorang atau sekelompok orang) berada di bawah kendali kerja atas seseorang dan dikuasai hidupnya, sehingga ia kehilangan sebagian atau seluruh kebebasan. Budak adalah orang-orang yang berada di bawah kontrol dan tereksplorasi. Ia kehilangan kepemilikan atas dirinya (jiwa dan raga) dan dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan orang lain (tuannya).

Perbudakan berlaku hampir di seluruh belahan dunia. Pusat-pusat peradaban besar kuno, seperti Mesir, Mesopotamia, Cina, India, Yunani dan Romawi tidak terhindar dari aktivitas perbudakan (Mariana, 2015). Sejarah mencatat bahwa pada makam prasejarah Mesir kuno (8000 SM) telah menunjukkan adanya perbudakan pada masa itu. Selain itu, di dalam prasasti kerajaan Hammurabi–Mesopotamia (1760 SM) memperlihatkan bukti yang sama tentang keberadaan perbudaka (Wahid, 2015).

Fenomena perbudakan yang fenomenal adalah ketika dibawanya dalam jumlah besar dan dalam kurun waktu yang lama, bangsa kulit hitam (Afrika) ke benua Amerika sejak abad ke-16 M. Para budak tersebut dipekerjakan di perkebunan-perkebunan yang baru dibuka di benua itu, khususnya oleh Spanyol, Portugis, Inggris dan Prancis. Perbedaan kepentingan budak, membawa pada Perang Budak (1861-1865) antara utara dan selatan di Amerika di bawah pemerintahan Presiden Abraham Lincoln (Blair, 2015). Kawasan Asia Tenggara masalah perbudakan telah berlangsung sejak masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Bangsa Melayu memiliki peran yang signifikan dalam menyebarkan perbudakan di wilayah Asia Tenggara. Budak dan institusi perbudakan tidak hanya terdapat pada masyarakat pendukung kebudayaan Melayu saja, melainkan terdapat juga pada masyarakat pendukung kebudayaan lain. Hal ini disebabkan masyarakat Melayu bersifat heterogen dalam berbagai aspek seperti etnisitas dan kultural yang didalamnya mencakup beberapa sistem. Selain itu, bangsa Melayu juga aktif bermigrasi baik dari satu pulau ke pulau yang lain. Mobilitas geografis penduduk telah menyebabkan proses adaptasi dan integrasi dalam masyarakat sehingga berpengaruh pada keberadaan institusi perbudakan itu sendiri (Murdiyanto, 2020).

Berdasarkan bukti yang ada, ternyata sejak abad ke-9 Masehi telah terjadi perdagangan budak bangsa Afrika di Nusantara, dikenal dengan istilah budak zanggi. Para pedagang Jawa pada abad ke-9 dan 10 M juga telah memperdagangkan orang-orang kulit hitam (Mahmud, 2014). Hal ini dapat diketahui dari prasasti perunggu (abad ke-10) di Jawa Timur yang memuat abdi-abdi, diantaranya muncul istilah jenggi. Para budak tersebut dipersembahkan kepada Kaisar Cina bersama persembahan lainnya. Ketika Tome Pires tiba di Melaka tahun 1511, menurutnya bahwa para saudagar dan elite Malaka telah mempekerjakan banyak budak untuk menanam tanaman ekspor di Malaka. Keramaian arus perdagangan Selat Malaka membuka peluang besar bagi siapa saja yang ingin berniaga di sana (Wahyuni, 2019). Kesultanan Melaka tampil sebagai bandar dagang besar yang memfasilitasi seluruh para pedagang dari berbagai belahan dunia untuk menjajakan hasil produk mereka sekaligus membeli produk dari daerah lain. Hiruk-pikuk komoditas yang diperjual-belikan di Malaka sebagai pelabuhan internasional salah satunya adalah budak (Roza et al., 2013). Budak termasuk salah satu komoditas dagang yang diperdagangkan secara legal sejak tahun 1786. Banyak elite dan masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah, baik yang tinggal pedalaman maupun di bandar-bandar niaga ikut terlibat dalam praktik bisnis perbudakan (Anatona, 2006). Itulah sebabnya pascapendudukan Portugis terdapat beberapa ribu budak di sana.

Selanjutnya, Portugis secara bertahap mendatangkan budak ke Banda. Duarte Barbosa, seorang geographer Portugis menyatakan bahwa pada tahun 1518 budak merupakan salah satu komoditi yang diperdagangkan. Menurut Pires dan pendapat lainnya menyatakan budak-budak yang diperdagangkan itu diperoleh dari Maladewa, Koromandel, India, Cina, Arakan, Nias, Banten, Sunda Kelapa, Makassar (dari Maluku dan kepulauan Sunda Kecil), Aru, Kei, Seram, Bali, Papua, Borneo, Palani (Kamboja), dan Champa (Reid 1983: 31-32; Reid 2011: 153). Selanjutnya diperdagangkan ke Aceh, Palembang, Melaka, Banten, Gresik, Tuban, Madura, Makassar, Sunda Kelapa, Bima, Sumbawa, Bali, Ambon, Buton dan lainnya. Awal abad ini pula menunjukkan bahwa jung-jung Asia Tenggara memiliki awak yang sebagian besar adalah budak, yang jumlahnya lebih banyak (45-65 orang), dibandingkan dengan awak kapal-kapal Eropa, walaupun ukuran kapalnya sama.

Berdasarkan sumber diketahui bahwa hingga abad 16 perdagangan budak merupakan bagian tak terpisahkan dalam perniagaan pada umumnya (Mawara, 2021). Budak diperoleh dengan berbagai cara, diantaranya jika seseorang tidak mampu membayar hutang (ini menjadi faktor utama, orang-orang tidak mampu membayar hutang dengan uang atau barang, maka wajib membayarnya dengan cara kerja paksa sebagai budak), tawanan perang, dilahirkan dari orang tua budak, tertawa ketika mengikuti perang, menjual diri, dijual oleh orang tua, atau suami, dan tidak mampu membayar denda di pengadilan, tidak mampu membayar mas kawin, penen yang gagal, kalah perjudian, dan lainnya. Budak juga dapat dipinjamkan pada pihak tertentu sesuai kesepakatan, dan disewakan. Semua pekerjaan kasar dikerjakan oleh budak (Sesse, 2016).

Budak-budak yang diperjualbelikan itu dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, diantaranya menjadi pekerja di keraton/istana para raja atau sultan dan golongan bangsawan. Kelompok ini bekerja di perkebunan (di Maluku orang-orang kaya memanfaatkan budak untuk menuai cengkih dari pohon yang mereka sewa dari para petani yang menanam pohon tersebut. Contoh lain adalah Kesultanan Aceh abad 17 yang tergantung pada pada pedalaman dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka langkah yang adalah melakukan penyerangan terhadap daerah lain dalam rangka mendapatkan budak untuk dipekerjakan di pedalaman

menggaran perkebunan), pelabuhan sebagai kuli angkut dan lainnya, membuat kapal/perahu, pendayung kapal atau perahu, anak buah kapal, berlayar, pekerja pertambangan besar atau kecil, petani, tukang bangunan, buruh perkotaan, tekstil, pembantu rumah tangga, penerjemah, juru tulis, pedagang ecerean, saudagar, gundik, serdadu, tabib, menteri, penghibur, pengrajin logam, menenun, memintal, mencelup, dan lainnya. Mereka ada yang dipekerjaan dalam jumlah besar di pabrik-pabrik. Dapat disimpulkan mereka mengerjakan semua pekerjaan kasar di berbagai bidang. Betapa penting posisi budak dalam setiap denyut kehidupan manusia ketika itu, sekaligus sebagai simbol status sosial. Kondisi ini menyebabkan kalangan bawah harus berjuang keras membeli budak agar statusnya naik menjadi kelompok elite. Membeli budak merupakan hal pertama dilakukan ketika mendapat keuntungan, baru diikuti hal lain seperti meminjamkan uang pada orang lain, melakukan pernikahan atau pesta dan lainnya.

Di kawasan Indonesia bagian timur, perdagangan budak telah berkembang sejak lama. Budak-budak dari Papua, kepulauan Seram, Timor, Pulau Buru dan Kalimantan diperjualbelikan di pasar-pasar lokal, seperti di Bima, Maluku, Sumbawa dan Bali. Budak-budak yang diperoleh melalui perang atau membelinya di pasar budak. Budak-budak tersebut diserahkan kepada pembeli dengan imbalan uang. Budak-budak yang diperjualbelikan itu diperoleh dengan cara penyeragaman-penyergapan orang-orang Buton yang tengah mencari ikan di laut dengan perahu seadanya oleh para bajak laut Bugis (mereka biasanya menguasai perairan di sekitar Pulau Sulawesi hingga pulau-pulau di Maluku, bahkan perairan Pulau Jawa dan pantai timur Sumatera hingga Selat Malaka. Kesigapan dan kekuatan kapal-kapal yang mereka miliki, memberi peluang selalu berhasil dalam perburuan mereka, hanya kapal-kapal yang dipersenjatai lengkap tidak mampu mereka taklukkan). Para nelayan bebas tersebut, dalam sekejap menjadi orang tidak bebas karena dijadikan budak. Mereka dijual kepada para pemilik perkebunan pala di Pulau Banda yang berkembang sejak abad 14 hingga abad 16 (pertengahan abad 15 Kepulauan Banggai merupakan salah satu lokasi tempat melakukan transaksi jual beli budak).

Ternyata buah pala juga tidak hanya bijinya, tapi juga dagingnya, yang dikenal dengan nama fuli, bahkan pemilik kebun juga mengembangkan pohon kenari yang dipetik buahnya dan diperdagangkan. Kondisi ini mengakibatkan kebutuhan budak-budak semakin besar, yang bertugas dalam proses memetik, mengolah hingga menjadi fuli dan biji, sekaligus memelihara perkebunan yang makin makin luas. Pekerjaan tersebut lebih disukai dikerjakan oleh kaum perempuan. Agar segala sesuatunya dapat berjalan lancar, maka para budak bekerja di bawah pengawasan seorang mandor (Suhartini, 2020). Seiring makin berkembangnya perdagangan pala, fuli dan kenari, maka kebutuhan budak juga semakin banyak, sehingga tercipta kelompok-kelompok budak yang menikah sesama mereka, atau budak dengan orang bebas, sehingga menghasilkan generasi berikutnya yang tetap menjadi budak, tapi kondisinya menjadi lebih bebas dibanding generasi pertama. Budak yang disayang majikannya atau majikannya meninggal, dapat menjadi orang yang bebas (Patty et al., 2020). Semua itu menyebabkan munculnya perkampungan keluarga budak (Fauzi & Razif, 2017)

Sebelum Portugis di Melaka, para bangsawan di sana memerintahkan para budak untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional, dengan pekerja budak yang sangat banyak. Itulah sebabnya pascapendudukan Portugis terdapat beberapa ribu budak di sana. Selanjutnya, ketika Portugis telah tiba di Indonesia pada 1512, maka secara bertahap mereka mendatangkan budak ke Banda. Duarte Barbosa, seorang geographer Portugis menyatakan bahwa pada tahun 1518 budak merupakan salah satu komoditi yang diperdagangkan. Menurut Pires budak-budak yang diperdagangkan itu diperoleh dari Maladewa, Koromandel, India, Cina, Banten, Aru, Kei, Seram dan Bali, Papua, dan lainnya. Selanjutnya diperdagangkan ke Aceh, Palembang, Melaka, Gresik, Tuban, Madura, Makassar, Sunda dan lainnya. Awal abad ini pula menunjukkan bahwa jung-jung Asia Tenggara memiliki awak yang sebagian besar adalah budak, yang jumlah lebih banyak pada kisaran 45 hingga 65 orang, dibandingkan dengan awak kapal-kapal Eropa walaupun ukuran kapalnya sama.

Membahas perkara budak di wilayah kepulauan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran Orang Laut. Kelompok ini adalah salah satu bagian penting dalam perburuan dan pengumpul budak. Mereka menangkap orang-orang dari desa-desa di pesisir dan menjual pada kapal-kapal yang membutuhkan hasil tangkapan mereka. Selain itu, kapal-kapal karam atau kandas juga menjadi sasaran dalam mendapatkan budak maupun harta benda awak kapal dan penumpang yang tersisa. Orang laut juga melakukan perompakan demi mendapatkan budak dan komoditi yang diperdagangkan dari kapal-kapal yang dijarah. Maraknya perburuan budak tidak terlepas dari naiknya kebutuhan akan budak, baik ddalam rangka dipekerjakan diperkebunan-perkebunan, maupun di rumah tangga orang kaya apalagi penguasa. Pada sekitar bulan Juni setiap tahunnya (cuaca terbaik untuk berlayar), maka Orang Laut mulai bergerak sesuai kelompoknya masing-masing. Satu kelompok bergabung sekitar dua puluh perahu, yang masing-masing memuat seratus orang. Jadi, dalam satu gerak pelayaran mereka mampu mengerahkan setidaknya dua ribu orang, yang nantinya ketika Kembali akan

membawa 2.500 orang budak, dengan wilayah jelajah hingga Jawa Timur dengan titik tumpunya tetap perairan Selat Melaka (Andaya, 2019).

Pada masa VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) budak makin dibutuhkan, khususnya untuk memenuhi keperluan tenaga kerja di perkebunan pala di Banda dan pekerjaan lainnya (Thalib, 2017). Itulah sebabnya dinyatakan bahwa VOC memperkenalkan perbudakan secara institusional (Hagerdal 2010). Sejak pendudukan Sunda Kelapa yang dirubah oleh Belanda menjadi Batavia, maka kota pelabuhan ini dijadikan pusat perdagangan budak baru bagi VOC (Tundjung & Roviyaniti, 2020). Perdagangan budak terus berlanjut pada masa VOC (Abi Fadila, 2022). Salah satu contoh buruk dari perbudakan masa VOC adalah menjual orang-orang merdeka untuk dijadikan budak (Husna, 2021). Peristiwa tersebut terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Spellman (1681-1684) yang korup dan menahan lebih dari seratus tanpa sebab yang jelas, serta membeli lada dengan harga yang lebih murah dari biasanya. Abad 18 VOC memanfaatkan budak-budak dari Bali untuk menjadi pasukan perang (Pardi, 2018). Sementara itu, Bali sebagai pemasok budak, hingga awal abad 19 masih aktif memperdagangkan budak sebagai instrumen menambah kekayaan. Tidak kurang dari dua ribu orang budak yang dijual oleh kalangan atas di Bali, yang keuntungannya dimanfaatkan untuk barang-barang “mewah” seperti candu, senjata dan koin tembaga. Lain di Bali, lain pula di kawasan Flores, Timor, Rote, Sumbawa, dan lainnya yang terus marak melakukan perdagangan budak, juga perampasan terhadap kapal-kapal berlayar atau terdampar di sana. Akibatnya Belanda mengirimkan pasukan untuk mengamankan daerah tersebut pada kisaran sebelum pertengahan abad 19 (Alasin, 2020).

Fenomena perbudakan seperti ini terus berkembang diberbagai tempat dan langgeng di setiap zamannya dengan bentuk-bentuk yang beragam. Pada masa sekarang pun perbudakan masih terjadi dengan berbagai bentuk, seperti para pekerja yang di beri upah tidak sesuai dengan beban kerja yang dilakukan, pembagian tugas yang tidak sesuai dengan kontrak kerja (Nugraha, 2015). Sesuatu yang tidak mengherankan apabila banyak bangsa dan negara di dunia memiliki catatan historis mengenai praktik perbudakan diwilayahnya. Salah satu wilayah di Asia Tenggara yang memiliki hubungan cukup kuat terkait aktivitas perbudakan dari masa kerajaan lokal sampai masa kolonial adalah Palembang. Kajian mengenai perbudakan di Palembang sangat menarik untuk di bahas karena berkenaan dengan aktivitas, sistem, dan perdagangan budak. Tulisan ini mencoba memaparkan aspek perbudakan di Palembang pada masa akhir Kesultanan Palembang awal abad 19 M. Pokok permasalahan tulisan ini berfokus pada bagaimana hubungan antara perbudakan di Kesultanan Palembang dan tekanan dari Inggris dan Belanda agar menghapuskan perbudakan di daerah tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (historis) yang berarti mengolah, menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau yang menjadi sumber sejarah. Berdasarkan data dan sumber-sumber tersebut, kemudian direkonstruksi melalui pikiran imajinatif sehingga menghasilkan suatu historiografi. Baik metode sejarah maupun historiografi merupakan suatu kesatuan, meski dalam metode sejarah memiliki tahapan seperti pengumpulan data (heuristik), verifikasi (kritik sumber) dan interpretasi. Dalam menyusun tulisan ini, peneliti melakukan kajian literatur baik menggunakan buku, jurnal, dan dokumen sejarah. Sumber-sumber tersebut peneliti temukan diberbagai perpustakaan dan platform *online* seperti *JSTOR*, *Archieven*, dan *Delpher*. Setelah melakukan seleksi data, peneliti memverifikasi data lewat perbandingan dan persamaan antara data satu dengan yang lainnya. Setelah itu peneliti mencoba melakukan interpretasi pada data tersebut dan menuliskannya dalam bentuk tulisan sejarah (historiografi).

Hasil dan Pembahasan

Palembang dan Perbudakan

Palembang sebagai kota tua dapat dirunut sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, dilanjutkan masa Kerajaan dan Kesultanan Palembang. Sebagaimana laporan Pires (Pires, 1944) yang menyatakan bahwa Palembang adalah salah satu pusat perdagangan budak, dan memasok budak ke Melaka dalam jumlah besar. Selain itu, Palembang juga menjadi salah satu pemasok penting bagi Melaka, barang-barang seperti bawang merah, bawang putih, anggur, daging, beras, benzoin, lilin malam, madu, rotan, beras, perak, emas dan katun. Abad 17 Palembang dan Jambi adalah wilayah penghasil lada yang potensial, itulah sebabnya kedua kawasan ini membutuhkan budak lebih banyak untuk dipekerjakan sebagai pengolah lahan perkebunan lada. Budak-budak tersebut umumnya diperoleh dari para pedagang Bugis dan Makassar. Akhir abad 17 Palembang masa pemerintahan Sultan Abdurahman Kholifatul Mukminin Sayidul Imam, yang merupakan sultan pertama dari Kesultanan Palembang, Ketika itu Palembang mengalami zaman keemasan berkat keuntungan dari penjualan dan perdagangan lada Click or tap here to enter text..

Dengan demikian, jelas sekali terlihat bahwa perluasan perkebunan lada, identik dengan meningkatnya kebutuhan budak, yang berimplikasi pada makin maraknya perdagangan budak hingga abad 18 di Palembang dan kawasan Indonesia barat umumnya. Pembahasan mengenai perbudakan akan difokuskan pada penghujung masa kesultanan ini, karena ditemukan bukti-bukti valid tentang perbudakan di Palembang. Sebagaimana sudah tertera sebelumnya bahwa Palembang sebagai kota yang terletak pada lokasi strategis, membuatnya menjadi pelabuhan yang menjadi persinggahan perdagangan dan pelayaran dari timur (Indonesia kawasan timur) dan barat (kawasan Sumatera, Semenanjung Melayu dan India), juga utara (Cina). Kesultanan Palembang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Palembang yang hancur akibat kalah perang melawan VOC pada tahun 1659. Dari puing-puing kehancuran inilah lahir Kesultanan Palembang dengan sultan yang pertama bernama Sultan Abdurahman Kholifatul Mukminin Sayidul Imam (1677-1702). Sultan inilah yang menubuhkan kerajaan ini dengan kekuasaan absolut lepas dari ke vazalan Kerajaan Mataram, sekaligus menempatkan Agama Islam sebagai agama kerajaan. Sejak peninggalan beliau, Palembang terus berkembang dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I (1724-1757). Pada masa pemerintahan beliau Palembang menikmati kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik dengan adanya penambangan timah, yang merupakan timah terbaik di dunia ketika itu. Timah-timah itu diekspor ke Cina, mereka olah untuk diekspor Kembali ke kawasan Asia Tenggara untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia pada waktu itu, khususnya yang berhubungan dengan kepercayaan (ANRI, Bundel Palembang No. 62.2; Click or tap here to enter text.).

Kesultanan Palembang membagi wilayah kekuasaannya atas dua bagian, yaitu wilayah kepungutan dan Sindang. Wilayah pertama berada di bawah kekuasaan langsung (tidak terlalu jauh dari ibukota Palembang) dari sultan dengan kewajiban membayar pajak. Sedangkan *Sindang* berada jauh dari ibukota, yaitu daerah perbatasan (perbatasan antara wilayah Kesultana Palembang dan Bengkulu, Palembang dan Lampung). Wilayah Sindang tidak berada di bawah kekuasaan langsung dari Sultan, mereka bebas dari pajak, sebagaimana berlaku untuk wilayah *Kepungutan*. Meskipun demikian, kelompok *Sindang* wajib menjaga keamanan perbatasan dari serangan musuh, dan menjaga adat istiadat lokal. Selain itu, para pemimpin *Sindang* wajib melakukan *milir sebo (seba)* setiap satu atau tiga tahun sekali ke Palembang, menghaturkan sembah kepada sultan dengan membawa upeti, dan sultan membalas persembahan tersebut. Inilah simbol hubungan erat antara pusat dan daerah khusus daerah perbatasan. Sultan juga mengikat daerah *Sindang* dengan menganugerahi mereka Undang-Undang *Sindang Mardika*, yang memuat berbagai peraturan bagi *Sindang* yang mempunyai tugas khusus di perbatasan Palembang (ANRI, Bundel Palembang No. 47.6). Posisi mereka sangat penting bagi Kesultanan Palembang, tanpa mereka sulit bagi Palembang bertahan dari berbagai rongrongan musuh, makanya mereka mendapat hak-hak istimewa. Sejauh sejarah di Kesultanan Palembang, tidak terdapat satu bukti pun bahwa kelompok ini melakukan perlawanan kepada sultan, mereka senantiasa tunduk dan patuh pada penguasa Palembang.

Sebagai perpanjangan tangan sultan, maka penguasa Palembang menempatkan wakilnya di pedalaman yaitu *Jenang*. *Jenang* menjalankan tugas tersebut dengan baik, dan bekerjasama dengan penguasa lokal yang disebut *Pasirah/Depati*. Para *Pasirah* juga dibantu oleh aparatnya yaitu *Pembarab/Krio*, dan *proatin* (ANRI, Bundel Palembang No. 15.7; No. 62.2). Aparat di atas memerintah secara otonom, sehingga jika terjadi hal-hal negatif, misalnya pencurian, sengketa dan lainnya, sepenuhnya diselesaikan *Pasirah* dan perangkatnya. Namun, jika kejahatannya sudah masuk kategori mengkhawatirkan, seperti pemberontakan, membangkang dan lainnya, maka para pelaku dikenai hukuman *Kapanjing*, (dibuang ke daerah lain yang letaknya jauh dari kampungnya sendiri. Artinya para pelaku jauh dari keluarganya. Selain itu, keluarga pelaku akan mendapat sanksi sosial yaitu dikucilkan dalam masyarakat. Hukuman seperti ini menyebabkan para pelakunya jera). Cara lainnya adalah para pelaku kejahatan di bawa ke pusat dan diadili serta di sumpah di atas Bukit Siguntang (Bukit paling sakral bagi Palembang sejak zaman Sriwijaya) Kerajaan juga mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang hukuman kepada penduduk yang bersalah, terdapat di dalam undang-undang yang dikenal dengan nama Undang-undang *Ratu Sinuhun* atau *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* (Undang-Undang *Susuhunan Cinde Balang/Sultan Abdurahman Kholifatul Mukmini Sayidul Imam*) (ANRI, Bundel Palembang No. 62.2; No. 15.7).

Perbudakan dan Konflik di Kesultanan Palembang Awal abad 19

Awal abad 19 Kesultanan Palembang adalah salah satu kerajaan yang besar dengan kekayaan yang sangat melimpah, sebagaimana diakui Raffles yang ketika menjadi bagian integral dari Kerajaan Inggris yang ingin meluaskan kekuasaannya dengan menguasai Nusantara yang ketika itu menjadi "milik" Belanda. Itulah sebabnya Raffles melakukan berbagai cara agar Palembang mendukung keinginan mereka untuk mengusir Belanda dari Palembang. Namun, keinginan tersebut tidak terwujud sebab Sultan Mahmud Badaruddin II menolak permintaan Raffles. Sultan memilih mengusir Belanda, setelah meyakini bahwa Belanda telah kalah tapi Perjanjian Tuntang (18 September 1811) belum dilaksanakan. Ini menjadi modal bagi Sultan untuk menolak dominasi Inggris ketika wakil-wakilnya menyodorkan perjanjian penyerahan Pulau Bangka yang

kaya timah dan lada (kekuatan ekonomi Palembang bertumpu pada timah, lada dan produk hutan lainnya) pada November 1811. Inilah awal petaka, ditandai dengan pengiriman ekspedisi Inggris ke Palembang pada April 1812. Palembang harus mengakui keberadaan Inggris, tanpa melakukan perlawanan berarti, padahal Sultan Badaruddin II sudah menyiapkan segala sesuatu (laskar, persenjataan, dan benteng pertahanan/Pulau Borang) guna melawan kekuatan militer Inggris.

Adik Sultan Badaruddin II yaitu Pangeran Adipati yang berambisi menjadi sultan, dan menjapat iming-iming menjadi sultan dari Kolonel Gillespie (pemimpin perang pasukan Inggris) jika tidak melakukan perlawanan. Akibatnya dengan mudah keraton *Kuto Besak* yang merupakan pusat pemerintahan Sultan Badaruddin II dapat dikuasai Inggris, dan Sultan mundur ke pedalaman, sedangkan adiknya menduduki tahta dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin II. Naik tahtanya Sultan Najamuddin II didahului dengan penandatanganan kontrak antara Sultan dan Kolonel Gillespie pada 17 Mei 1812. Dalam perjanjian tersebut, dinyatakan bahwa Sultan Najamuddin II menyerahkan Pulau Bangka dan Belitung kepada Raja Inggris dan EIC (English Indische Compagnie) dan pulau-pulau kecil lainnya. Poin lain yang tak kalah pentingnya adalah Sultan harus melakukan penghapusan budak di wilayah Kesultanan Palembang, juga wajib memenuhi kebutuhan makanan wakil-wakil Inggris di Pulau Bangka. (*ANRI*, Bundel Palembang No. 67; *The Asiatic Journal*, 1824; Wargadalem, 2017). Jadi, di mata Inggris pada waktu itu, perbudakan di Palembang sudah sangat massif sehingga perlu dimasukkan ke dalam kontrak antara Inggris (Kolonel Gillespie) dan Kesultanan Palembang (Sultan Ahmad Najamuddin II).

Kaitannya dengan perbudakan, disebutkan bahwa Palembang aktif dalam perdagangan budak, dan menjadi salah satu pusat perdagangan budak. Pembeli utama budak-budak yang dipasarkan oleh Palembang adalah orang-orang Portugis abad 16. Budak-budak yang ada di Palembang diperoleh dari orang-orang Bugis yang membawanya dari Makassar. Selanjutnya, budak-budak tersebut dikirim ke Thailand (Ayutthaya). Pendapat Reid tersebut didukung oleh Lopian dengan pernyataan bahwa Palembang berperan aktif dalam pengiriman budak-budak ke Melaka pada abad 16. Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti tertulis, bahwa Palembang sudah jauh sebelum abad 19 telah menjadi bagian aktif dalam perdagangan budak Nusantara. Itulah sebabnya, ketika Inggris mulai bercokol di kesultanan ini menekankan perlunya meniadakan perbudakan.

Pendudukan Inggris atas Palembang selama lima tahun lebih (April 1812-Oktober 1816). Era baru bagi Kesultanan Palembang, yang harus menerima fakta di bawah kendali Inggris. Namun, konflik tidak mereda sebab Sultan Badaruddin II terus melakukan perlawanan dan blokkade dari pedalaman yaitu dusun Boya Langu (Baylangu) saat ini berada di kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menyebabkan residen Inggris waktu itu yaitu Mayor William Robison memilih berdamai dengan Sultan Badaruddin II dan menempatkannya kembali sebagai sultan Palembang yang berkedudukan di Keraton Kuto Besak (Juli-Agustus 1813). Keputusan sepihak itu ditolak Letnan Gubernur Raffles yang berkedudukan di Batavia. Akibatnya Mayor Robison terpaksa menurunkan kembali Sultan Badaruddin II dan menaikkan adiknya Sultan Najamuddin II ke atas tahta kerajaan ini. (*ANRI*, Bundel Palembang No. 67).

Naik tahta kedua kalinya itu tentunya disertai dengan perjanjian dengan wakil Inggris Colebrooken (pengganti Mayor Robison). Artinya hanya dalam jangka waktu satu tahun tiga bulan Sultan Najamuddin II telah menandatangani dua kali perjanjian dengan Inggris. Perjanjian tersebut memuat hal-hal penting diantaranya menyerahkan secara mutlak Pulau Bangka-Belitung dan pulau-pulau kecil lainnya. Selain itu, juga memuat tentang kewajiban untuk membuka hubungan dengan Bengkulu dan Lampung, menyetorkan hasil bumi, membiayai Sultan Mahmud Badaruddin II, menghapuskan perbudakan, dan lainnya (Wargadalem, 2017). Dengan demikian, masalah perbudakan di Kesultanan Palembang menjadi salah satu prioritas untuk dihapuskan sebagaimana termaktub dalam perjanjian dengan Inggris. Dua belas tahun kemudian Inggris juga berupaya melalui perjanjian dengan penguasa Pulau Nias untuk melarang perbudakan. Kondisi perbudakan sulit diberantas, terbukti mereka tetap mengekspor budak ke Singapura dan Padang, sebab masalah perbudakan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka yang menguntungkan pihak tertentu.

Selama pemerintahan Inggris di Palembang, mereka menempatkan pusat pemerintahannya di Kota Mentok Bangka. Untuk menjaga keamanan pusat pemerintahan tersebut, penguasa Inggris di sana membangun benteng pertahanan bernama *Fort Nugent*. Sejak itulah Inggris mengeruk keuntungan dari hasil penambangan timah rata-rata 44 persen per tahun, dengan jumlah laba sebesar 1.480.674,04 *rupee*. Sesuai dengan misinya mengeruk keuntungan dari timah Bangka, maka Residen M.H. Court hanya memfokuskan perhatiannya pada Pulau Bangka dan jalur pelayaran di Selat Bangka. Palembang di bawah kendali Sultan Najamuddin II. Berhubung sultan ini kurang berpengalaman, sedangkan pemasukan rendah karena pulau Bangka dikuasai Inggris, padahal timah adalah penopang utama perekonomian Palembang. Sementara itu, daerah pedalaman sebagian tetap setia pada Sultan Badaruddin II, sehingga menolak perintah Sultan

Najamuddin II. Bagaimana dengan daerah *Sindang*? Ternyata daerah perbatasan tersebut seolah tidak tersentuh oleh kekuasaan induk di Palembang.

Akibatnya kawasan tersebut sering bergolak, bahkan pergolakan menjalar ke hampir seluruh wilayah kerajaan. Lemahnya posisi Sultan Najamuddin II mengakibatkan dia tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai kontrak, diantaranya tentang pemenuhan kebutuhan Sultan Badaruddin II, juga soal perbudakan, dan lainnya. Otomatis, hal ini mengakibatkan “permusuhan” dua saudara dan pengikutnya semakin tajam, sehingga kondisi semakin tidak terkendali, baik di pusat maupun di daerah kekuasaan di pedalaman. Kondisi makin parah, Ketika sultan membagi-bagikan tanah-tanah di pedalaman kepada keluarga dan dieksploitasi secara besar-besaran. Kondisi ini belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga perampasan, perampokan, pembunuhan dan perdagangan budak semakin menjadi-jadi. Budak menjadi komoditi yang menggiurkan, baik di ibukota maupun di wilayah pedalaman. Daerah *Sindang* yang damai, hanya tinggal cerita. Penjarahan di wilayah perbatasan ini membawa harta benda dan manusia yang dijadikan budak, juga diperdagangkan. Warisan masa pemerintahan Inggris yang abai pada daerah di pedalaman, berlanjut terus ketika Inggris dengan terpaksa harus menyerahkan kembali kekuasaan ke tangan Belanda sesuai Traktat London (Agustus 1814), yang terealisasi pada Oktober 1816. (*ANRI*, Bundel Palembang No. 5.1)

Perpindahan kekuasaan dari Inggris ke Belanda, tidak menyebabkan kondisi jadi reda. Dua wakil Belanda yaitu K. Heynis dan R. Coop A.Groen, secara berturut-turut tidak mampu memperbaiki keadaan. Terbukti pada saat Palembang kedatangan orang-orang Komerling (lokasinya lebih dekat ke ibukota Palembang) yang menuntut keadilan dan perlindungan kepada sultan karena daerah mereka tidak aman. Mereka selama ini senantiasa dilanda ketakutan, karena sering terjadi penjarahan, perampokan terhadap harta benda mereka juga perbudakan. Contoh lain adalah kekacauan di daerah Pasemah, dan Pasemah Ulu Mana. Dusun-dusun di sana terbakar dan penduduk melarikan diri ke hutan-hutan untuk menyelamatkan diri. Kondisi tersebut menyebabkan residen Inggris di Bengkulu Siddon melayangkan protes pada Belanda di Palembang. Menurut daerah Bengkulu yang berbatasan dengan daerah Palembang, senantiasa jadi korban perampokan, penjarahan dan perampasan manusia untuk dijadikan budak dan diperjualbelikan. Hal yang sama terjadi di perbatasan Lampung. Tidak kurang dari 700 penduduk yang diserang dan dijadikan budak (Wargadalem, 2017). Jadi, kekacauan identik dengan makin berkembangnya perbudakan, yang umumnya diperjualbelikan.

Jika di ibukota Palembang menjadi salah satu pusat perdagangan budak antarwilayah di pantai timur, bahkan lebih jauh mencapai kawasan Semenanjung Melayu dan lainnya, maka di pedalaman juga marak penjarahan manusia dengan harta bendanya, dan dijadikan budak untuk dijadikan komoditi perdagangan. Di pedalaman kondisinya lebih parah karena tidak ada jaminan keamanan, sehingga berlaku hukum rimba dan rakyat memilih tinggal di hutan sebab dusun-dusun (desa-desa) mereka telah habis terbakar atau dibakar oleh para penjarah. Dalam kondisi demikian, pemerintah kolonial Belanda memandang perlu melakukan Tindakan tegas, agar keamanan dapat ditegakkan dengan cara mengirimkan orang yang kuat dan tepat yaitu Komisaris Muntinghe, yang tiba di Palembang pada 4 Juni 1818. Melihat kondisi yang ada ketika itu, dan informasi yang diperolehnya sebelum menuju Palembang, maka penguasa baru ini memutuskan untuk membagi kekuasaan Palembang menjadi dua, antara Sultan Badaruddin II (Sultan Mudo) dan Sultan Najamuddin II (Sultan Mudo).

Hal ini terjadi karena Ahmad Najamuddin II tetap menjalin hubungan dengan Raffles di Bengkulu, dan menjadikannya sebagai pelindung. Otomatis, tidakan tersebut membuat wakil Belanda di ibukota gusar dan menganggapnya sebagai Tindakan yang membahayakan. Pembagian kekuasaan tersebut membawa Raffles mengirimkan pasukannya ke Palembang di bawah pimpinan Kapten Salmond. Situasi memburuk karena dua pasukan berhadapan-hadapan di pedalaman Palembang (daerah perbatasan Palembang-Bengkulu), yang berakhir dengan mundurnya pasukan Belanda. (*Bataviasche Courant*, 26 Juni 1819, nomor 26). Tindakan tersebut membuat wajah Belanda tercoreng, sehingga Muntinghe membuat kebijakan untuk menghalaunya hingga perbatasan Palembang- Bengkulu. Konflik antara keduanya tersu berlanjut, khususnya di pedalaman. Sambil terus melakukan pemantauan dengan pasukan, Mutinghe juga melakukan pengamatan dan penelitian terhadap daerah-daerah yang didatanginya, untuk melihat potensi dan kebijakan apa yang akan diambilnya. Ini juga pesanan dari pemerintah pusat di Batavia.

Menurutnya bahwa daerah pedalaman Palembang memiliki potensi besar mendatangkan keuntungan. Salah satunya menerapkan pajak bagi daerah *sindang*, cukai ekspor dan impor, penjualan candu dan garam, juga diadakannya *uang semuhan* (pajak rumah tangga). Ketentuan lain yang tak kalah pentingnya adalah memperketat larangan perbudakan, baik terhadap penduduk asli maupun pendatang, walaupun faktanya budak umumnya pendatang dari luar, yang dikenal dengan nama “orang abdi” (*ANRI*, Bundel Palembang No. 47.6; Wargadalem, 2017). Fakta di atas merupakan bukti terakhir pembahasan perbudakan di Kesultanan Palembang, mengingat pada tahun berikutnya telah terjadi peperangan antara Palembang dan Belanda (Juni

dan Oktober 1819), yang semuanya dimenangkan oleh Palembang di bawah Sultan Badaruddin II. Dari tahun 1819 hingga 1821 Palembang dihadapkan pada persiapan menghadapi serangan balik dari Belanda, dan terbukti pada Juni 1821 kembali terjadi peperangan dahsyat antara kedua bangsa.

Sebelum hal itu terjadi sudah ada kontrak (18 April 1821) antara putra Sultan Najamuddin yaitu Pangeran Prabu Anom (dibuang Belanda di Cianjur tahun 1818 bersama ayah dan kerabatnya) dan Belanda. Selain memuat tentang pengangkatan Prabu Anom sebagai sultan Palembang dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin III, sedangkan ayahnya menjadi *Susuhanan*. Najamuddin III diwajibkan membantu Belanda, tidak boleh memiliki persenjataan militer, sedangkan ekspor dan impor dikendalikan oleh Belanda. Kolonialisme ini juga melarang perbudakan dan perampokan khususnya di daerah perbatasan. (ANRI, Bundel Palembang No. 5.1). Kontrak tersebut merupakan perjanjian tertulis terakhir antara “wakil” Palembang dengan Belanda yang membahas perbudakan. Sebab dengan kekuatan penuh Belanda membalas dendam atas dua kali kekalahan pada perang tahun 1819. Peperangan dahsyat terjadi antara dua kubu yang terus bertikai sejak 1819. Perlawanan hebat dari laskar Palembang tidak mampu melawan besarnya persenjataan, armada perang dan kekuatan serdadu Belanda dalam jumlah besar, sehingga Palembang harus mengakui kekalahannya. Sejak itu Palembang secara tidak langsung di bawah kendali Belanda hingga tahun 1825 dihapuskan oleh Belanda. Apakah perbudakan berakhir dengan dikuasainya Palembang? Ini membutuhkan penelitian lebih lanjut, namun sebagai instrumen yang dibutuhkan dan menguntungkan, maka perbudakan adalah sesuatu yang sulit dihapuskan hingga abad 20.

Simpulan

Hubungan antara Palembang dan perbudakan merupakan satu garis panjang yang tak terpisahkan. Berkat keramaian pelabuhan Palembang dan hubungannya dengan dunia perniagaan internasional membuat Palembang menjadi salah satu wilayah penting dalam perdagangan budak. Selain budak sebagai komoditi, perbudakan juga digunakan oleh para penguasa dan elite lokal untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan pekerja rumah tangga. Sehingga aktivitas perbudakan di Palembang menjadi masif, terlebih lagi ketika Palembang mulai mengedepankan aktivitas pertambangan dan perkebunan. Membuat sistem perbudakan semakin langgeng di bawah kekuasaan sultan. Penguasaan Inggris di wilayah Palembang menjadi peredup aktivitas perbudakan karena aturan yang mereka keluarkan yakni pelarangan perbudakan. Perdagangan budak tidak hanya terjadi di ibukota Palembang sebagai salah satu pusat perdagangan budak, juga terjadi di pedalaman atau perbatasan antara Kesultanan Palembang dengan Bengkulu dan Lampung. Belanda juga menekan Palembang agar menghapuskan perbudakan, yang ketika itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Meskipun sudah tertuang di dalam perjanjian, namun faktanya perbudakan tetap berlangsung.

Referensi

- Abi Fadila, M. (2022). Menilik sejarah lokal: Riwayat pulau Onrust tahun 1613-1883. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 12(1), 31–44.
- Alasin, R. P. (2020). Peran Daud Beureueh Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Andaya, E. (2019). Race-ing time: clinical temporalities and inequality in public prenatal care. *Medical Anthropology*, 38(8), 651–663.
- Apriana, A., & Heryati, H. (2021). Perekonomian Masyarakat Sumatera Selatan abad 15-18 M. *Danadyaksa Historica*, 1(1), 1–11.
- Blair, W. A. (2015). Finding the Ending of America's Civil War. *The American Historical Review*, 120(5), 1753–1766.
- Fauzi, M., & Razif. (2017). Jalur Rempah dan Dinamika Masyarakat Abad X-XVI: Kepulauan Banda, Jambi, dan Pantau Utara Jawa (p. 90). Edited by Singgih Tri Sulistiyono. Jakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat
- Husna, A. H. (2021). KONTEKSTUALISASI MAKNA MILK AL-AIMAN DALAM AL-QUR'AN (STUDI TAFSIR TAHLILI QS AN-NISA': 36). UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
- Mahmud, M. I. (2014). Komoditas dan dinamika perdagangan di Papua masa sejarah. *Berkala Arkeologi*, 34(2), 183–198.
- Mariana, A. (2015). Perbudakan seksual: perbandingan antara masa fasisme Jepang dan neofasisme Orde Baru. Marjin Kiri.
- Mawara, A. (2021). Pulau Miwara Pusat Niaga Masa Lampau: Tinjauan Sejarah Perdagangan Tradisional di Teluk Triton. *Kebudayaan*, 16(2).

- Murdiyanto, E. (2020). Sosiologi perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN" Veteran
- Nugraha, M. T. (2015). Perbudakan Modern (Modern Slavery): Analisis Sejarah dan Pendidikan. *Jurnal Al-Turats*, 1(1).
- Pardi, I. W. (2018). Perdagangan Budak di Pulau Bali Pada Abad Ke XVII-XIX. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 20(1), 61–74.
- Patty, F. N., Wenno, V. K., & Toisuta, F. A. (2020). Keluarga dan Pendidikan Karakter: Menggali Implikasi Nilai-nilai Hausetafel dalam Efesus 6: 1-9. *KURIOS (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen)*, 6(2), 102–215.
- Roza, E., Berrein SR, S., Azis, M., Omar, K., Shomary, S., & Endang, H. (2013). Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Meranti. Yayasan Pusaka Riau.
- Sesse, M. S. (2016). Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 9(2), 315–331.
- Suhartini, E. (2020). Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah. PT. Rajagrafindo.
- Thalib, U. (2017). Orang Banda Dalam Perspektif Sejarah Maritim. *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 3(1), 28–48.
- Tundjung, T., & Roviyantri, R. (2020). Dari Sunda Kelapa Ke Tanjung Priok. *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(2).
- Wahid, A. H. (2015). Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith And Sirah Nabawiyah: Textual And Contextual Studies. *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, 8(2).
- Wahyuni, I. (2019). Pengaruh Tiongkok Dalam Perdagangan Maritim Di Pelabuhan Malaka Abad Xv. Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah.
- Wargadalem, F. R. (2017). Bacan Zuriat Palembang yang “Hilang”(Peer Review).